

**PEMBERDAYAAN KASUS PSIKOTIK SEBAGAI
UPAYA PENGEMBALIAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(Studi Kasus di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial Sidoarjo)**

Nur Khabibah

Universitas Trunojoyo Madura

Email : khabibahnur0520@gmail.com

Mohtazul Farid

Universitas Trunojoyo Madura

Journal of Correctional Issues
2023, Vol.6 (1)
Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Review
31-05-2023

Accepted
26 Juni 2023

Abstract (Left, Bold, Italic, Calibri 12)

Empowerment is a process to form empowered individuals over themselves. In reality, not all individuals are empowered over themselves. This happens to people with social welfare problems, one of which is psychotic. Powerlessness that occurs due to various conditions such as disability, neglect, poverty, and social disability. Based on these conditions, resulting in them not being able to carry out their social functions properly in society. The empowerment model is one of the efforts to shape social functioning. The objectives of this study include two things. First, to find out the empowerment model applied by the Sidoarjo Social Service and Rehabilitation Center for people with psychotic type social welfare problems. Second, to determine the social functioning of people with psychotic type social problems after following the empowerment model. This research uses the ACTORS theory by Sarah Cook and Steve Macaulay supported the concept of social functioning. This research uses qualitative methods, case study approach. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The technique of determining informants uses purposive sampling. Miles and Huberman model data analysis. Data validity techniques use source triangulation. The results of this study show that the empowerment model applied to psychotic type PMKS by the Sidoarjo Social Service and Rehabilitation Center consists of guidance, mental and spiritual, social, and skill training programs. Based on the research conducted, the program can form social functioning in psychotic type PMKS. This happens to psychotic PMKS who are still in the hall or return to the family. The first indicator in the concept of social functioning, evidenced by independence in getting a job. In the second indicator, the ability to perform tasks according to their status. The third indicator shows the initiative of action when experiencing problems.

Keywords :

Empowerment, Social Functioning, People With Social Welfare Problems, Psychotic

Abstrak

Pemberdayaan merupakan proses untuk membentuk individu berdaya atas dirinya sendiri. Pada realitanya tidak semua individu berdaya atas dirinya sendiri. Hal ini terjadi pada penyandang masalah kesejahteraan sosial, salah satunya adalah psikotik. Ketidakberdayaan yang terjadi diakibatkan karena berbagai kondisi seperti kecacatan, keterlantaran, kemiskinan, dan ketunaan sosial. Berdasarkan kondisi tersebut, mengakibatkan mereka tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik dalam Masyarakat. Model pemberdayaan merupakan salah satu

upaya untuk membentuk keberfungsian sosial. Tujuan dari penelitian ini meliputi dua hal. Pertama, untuk mengetahui model pemberdayaan yang diterapkan Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sidoarjo kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial jenis psikotik. Kedua, untuk mengetahui keberfungsian sosial penyandang masalah sosial jenis psikotik pasca mengikuti model pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan teori ACTORS oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay didukung konsep keberfungsian sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Analisis data model miles dan Huberman. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan yang diterapkan pada PMKS jenis psikotik oleh Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sidoarjo terdiri dari program bimbingan, mental dan spiritual, sosial, dan pelatihan keterampilan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, program tersebut dapat membentuk keberfungsian sosial pada PMKS jenis psikotik. Hal tersebut terjadi pada PMKS psikotik yang masih berada di balai maupun kembali ke keluarga. Indikator pertama dalam konsep keberfungsian sosial, dibuktikan dengan kemandirian dalam mendapatkan pekerjaan. Pada indikator kedua, kemampuan menjalankan tugas sesuai statusnya. Pada indikator ketiga ditunjukkan adanya inisiatif tindakan saat mengalami permasalahan.

Kata kunci :

Pemberdayaan, Keberfungsian Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Psikotik

Pendahuluan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan seseorang yang memiliki gangguan, hambatan, dan kesulitan yang membuat dirinya tidak dapat melaksanakan fungsi sosial dengan baik. Penyebabnya adalah kemiskinan, cacat fisik, dan keterlantaran. Akibat dari hal tersebut adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosialnya secara mandiri (Syamsi, et al., 2018).

Pemerintah dalam regulasinya melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 telah mengkalsifikasikan penyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi 26 jenis, salah satunya adalah psikotik. Pengertian psikotik didefinisikan dengan gangguan kejiwaan pada individu yang menyebabkan ketidakmampuan dalam membedakan antara sesuatu yang nyata dan tidak nyata. Kondisi tersebut disebut dengan

istilah kehilangan *reality testing* yang menyebabkan seseorang mengalami delusi serta halusinasi (Taftazani, 2017).

Pengertian psikotik menurut Yosep yang merupakan pakar keperawatan jiwa, di definisikan dengan kelainan jiwa yang disertai disintegrasi kepribadian dan gangguan kontak dengan kenyataan. Penderita penyakit ini ditandai dengan adanya gangguan realitas, halusinasi, dan delusi. Menurut Sundari, Psikotik merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang dalam menilai kenyataan yang terjadi pada dirinya (Yosep, 2010).

Menurut Yosep, penyebabnya seseorang menderita psikotik beragam, yaitu gangguan pada syaraf otak sejak lahir atau karena mengalami suatu kejadian tertentu. Sebab lainnya adalah karena pengaruh konsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang diluar kepentingan kesehatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jawa Timur mencapai 7561 jiwa. Akibat jumlah yang terlalu tinggi tersebut perlu adanya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah.

Secara sosiologis, keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dikategorikan sebagai masalah sosial. Keberadaan masalah sosial tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial belum mencapai tahap pemerataan pada masyarakat. Sehingga perlu langkah penanganan untuk mencapai kesejahteraan sosial khususnya pada Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Penanganan permasalahan psikotik pada beberapa wilayah di Indonesia memiliki kebijakan masing-masing. Pada Provinsi Riau, penanganan psikotik dilakukan melalui Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru dan Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Bengkulu. Penanganan tersebut dirasa kurang tepat dan kurang maksimal karena pihak Panti Sosial Bina Laras (PSBL) hanya menerima 5 orang per tahun untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Selanjutnya, penanganan Psikotik yang dilakukan di Yogyakarta adalah melalui Rumah Singgah Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta (BRSBKL). Model penanganan yang dilakukan adalah dengan melalui kegiatan bimbingan mental dan keterampilan. Tujuan dilakukannya langkah tersebut adalah untuk melatih kemandirian.

Berbeda halnya dengan penanganan psikotik yang dilakukan di Banda Aceh yang melalui Rumah Sakit Jiwa dengan tenaga psikolog. Proses penanganan dilakukan melalui psikoterapi yang diklasifikasikan menjadi 4 model, yaitu interpersonal, sosial,

eksistensial, dan terapi suportif. Fokus penanganan yang dilakukan adalah dengan menggali potensi diri, melatih berkomunikasi, dan menggali harapan atau masa depan.

Selain itu, Upaya penanganan psikotik juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langkah awal penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah dengan melakukan upaya pembersihan di jalanan atau yang disebut sebagai razia, dilanjutkan dengan identifikasi diri, kemudian dilakukan penempatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sesuai dengan jenis.

Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dilakukan dengan membentuk dan mengembalikan keberfungsian sosial. Tujuannya adalah menjadikan penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normal. Pembentukan keberfungsian sosial pada individu meliputi kemampuan dalam tiga hal, yaitu memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran, dan menyelesaikan masalah.

Pada Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sidoarjo terdapat permasalahan keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, salah satunya adalah psikotik. Tempat ini merupakan salah satu instansi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam melakukan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jawa Timur.

Penanganan yang diberikan adalah memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan membentuk kembali keberfungsian sosial. Upaya yang dilakukan dalam mengembalikan keberfungsian sosial adalah dengan melakukan pemberdayaan.

Pemberdayaan sebagai proses mencapai sesuatu, bukan tindakan instan. Pemberdayaan sebagai sebuah proses, bersifat menyeluruh melibatkan berbagai pihak. Antara lain motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan. Proses tersebut diimplementasikan dengan meningkatkan pengetahuan, kreativitas, memberikan kemudahan, dan peluang atau akses dari kesejahteraan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat (Gischa, 2020). Objek dari proses pemberdayaan dalam kehidupan sosial adalah manusia atau disebut masyarakat.

Dasar keberlangsungan proses pemberdayaan adalah berorientasi pada nilai-nilai yang dapat diimplementasikan dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena tujuan utama penanganan yang diberikan adalah untuk menyiapkan para klien penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk kembali ke keluarga. Pemberdayaan dilakukan dengan berfokus pada pemberian kemampuan dan keterampilan kepada klien. Implementasi pemberdayaan adalah melalui program kegiatan.

Penelitian ini sebagai wujud penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya pada jenis psikotik. Pemberdayaan tidak hanya bertujuan dalam membentuk keberfungsian sosial, melainkan membentuk kemandirian untuk mempersiapkan ketika PMKS kembali ke keluarga dan masyarakat. Model pemberdayaan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori ACTORS yang bersumber dari pemikiran Sarah Cook dan Steve Macaulay. Sedangkan keberfungsian sosial dianalisis keberhasilannya melalui tiga indikator yang ditetapkan peneliti. Analisis keberfungsian sosial pada PMKS jenis

psikotik setelah menjalani model pemberdayaan berfokus pada keberhasilan penerapan pada masing-masing indikator dalam kehidupan sehari-hari.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2018).

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan studi kasus yang berfokus pada eksplorasi mendalam terkait kejadian, proses, dan aktivitas yang melibatkan satu orang atau lebih. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non partisipan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi saat penelitian dilakukan.

Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Informan yang dipilih peneliti berdasarkan kriteria yang ditentukan terdiri dari pekerja sosial, rehabilitasi sosial, klien psikotik, dan keluarga klien psikotik. Teknik analisis data menggunakan model miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan data.

Hasil dan Pembahasan

Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sidoarjo

Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo pertama kali didirikan pada tanggal 27 Februari 1975 / 1976 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada pembangunan tersebut, masih belum menggunakan nama balai melainkan Panti Rehabilitasi Sosial (PRS). Lembaga ini fokus dalam menangani gelandangan, pengemis, dan orang terlantar. Kemudian PRS berubah nama menjadi Sarana Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Orang Terlantar (SRPGOT). Pada tanggal 23 April 1994, SRPGOT berubah lagi menjadi Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Mardi Mulyo. Perubahan selanjutnya dari nama PSBK Mardi Mulyo adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gelandangan dan Pengemis (Gepeng).

Setelah 18 tahun menjadi UPT Gepeng, berubah nama lagi menjadi Balai Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jalanan pada 12 November 2012. Selanjutnya pada 9 November 2016 mengalami perubahan nama menjadi Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. Perubahan tersebut sekaligus ditetapkannya objek penanganan dengan berfokus pada 5 golongan PMKS, yaitu gelandangan, pengemis, psikotik, wanita tuna susila, dan anak jalanan.

Pada kenyataannya, Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial hanya menangani 3 golongan PMKS, meskipun regulasi yang ditetapkan terdapat 5 golongan. Sehingga terdapat 2 golongan yang tidak ditangani yaitu wanita tuna susila dan anak jalanan. Hal ini karena sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai sehingga menjadi tidak maksimal dalam pelayanan dan keamanan.

Keberadaan Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah sebagai tempat sementara untuk memberikan pelayanan dan penanganan pertama dalam menyiapkan diri PMKS sebelum kembali ke keluarga atau dirujuk ke UPT yang lain sesuai dengan prosedur yang ada. Proses penanganan dilakukan dengan menyiapkan bekal secara fisik maupun psikologis melalui program yang diterapkan oleh Balai.

Berdasarkan data yang dihimpun pada Desember 2022, jumlah keseluruhan klien atau penerima manfaat di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo mencapai 150 orang. Jumlah tersebut didapatkan melalui banyak sumber seperti Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) melalui upaya penertiban atau Razia, kiriman dinas sosial kabupaten/kota di Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, kiriman keluarga, hingga menyerahkan diri secara langsung.

Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jenis Psikotik

Pemberdayaan yang diterapkan pada klien psikotik berfokus memperbaiki kondisi psikologis terhadap masalah yang melatarbelakangi dirinya menjadi psikotik. Setelah kondisi psikologis tersebut mulai pulih dan membaik, maka program pemberdayaan difokuskan untuk mempersiapkan mereka untuk hidup dan kembali di masyarakat. fokus pemberdayaan yang diberikan adalah pembentukan potensi diri pada masing-masing klien.

Adapun model pemberdayaan yang diterapkan oleh Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sidoarjo dalam membentuk keberfungsian sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Kegiatan Pemberdayaan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sidoarjo

No.	Jenis Program	Implementasi Kegiatan
1.	Bimbingan a. Fisik b. Non-Fisik	a. Gerakan Senam Pagi Rutin (RASOTIN) dan Gerakan Senam Otak Rutin (RASPUTIN) b. Bimbingan Pengajaran
2.	Mental dan Spiritual	a. Panggung ekspresi b. Kajian kerohanian c. Konseling d. Sistem Reward bintang
3.	Sosial	Penerapan sistem ketua kelas
4.	Pelatihan Keterampilan	a. Pertanian b. Hasta Karya

A. Program Bimbingan

Kegiatan dalam program ini terdiri dari dua jenis, yaitu bimbingan fisik dan bimbingan non-fisik. Pada bimbingan fisik dilakukan dengan melibatkan pergerakan fisik. Implementasi bimbingan fisik adalah melalui kegiatan Gerakan Senam Pagi Rutin (RASPUTIN) dan Gerakan Senam Otak Rutin (RASOTIN). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meminimalisir rasa malas klien dalam mengikuti kegiatan lain.

Kegiatan bimbingan non-fisik merupakan proses pembelajaran bagi para klien yang dipimpin oleh unit pekerja sosial. Pedoman dasar dalam kegiatan ini adalah memberikan pengajaran terhadap hal positif yang nantinya dapat diterapkan ketika mereka kembali ke keluarga atau masyarakat. Pemberian tema bimbingan berpedoman terhadap hal yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kebersihan lingkungan, pola hidup sehat, etika, dll.

Pada kajian pemberdayaan yang dijelaskan oleh Sulistyani tentang tiga tahap pemberdayaan, kegiatan bimbingan non-fisik merupakan bentuk dari tahapan transisi kemampuan dari pihak yang berdaya terhadap pihak yang belum atau tidak berdaya. Pihak berdaya dalam hal ini adalah unit pekerja sosial dan pihak belum berdaya adalah klien.

B. Program Mental dan Spiritual

Orientasi program ini yaitu perbaikan kondisi psikologis klien. Kegiatan dalam program ini adalah adanya panggung ekspresi, kajian kerohanian, dan konseling.

Pertama, panggung ekspresi merupakan sarana aktualisasi diri bagi klien. Penerapan panggung ekspresi adalah untuk melatih sikap percaya diri klien ketika dirinya dilihat oleh banyak orang.

Kedua, kajian kerohanian yang dilaksanakan dalam bentuk kajian untuk memperbaiki spiritualitas klien. Tema kajian yang diambil adalah tentang kehidupan sehari-hari dan dikorelasikan dengan kajian agama, seperti pentingnya bersyukur, perilaku hidup bersih dalam pandangan islam, pentingnya beribadah.

Kegiatan ini merupakan penerapan dari dua tahap pemberdayaan, yaitu transisi kemampuan serta pembentukan kesadaran dan perilaku.

Ketiga, konseling merupakan kegiatan yang dilakukan oleh klien terhadap unit pekerja sosial. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kebebasan terhadap apa yang dirasakan klien selama dirinya di balai. Peran pekerja sosial dalam kegiatan ini adalah memberikan motivasi dan afirmasi positif terhadap apa yang disampaikan klien.

Keempat, sistem reward bintang merupakan metode yang diterapkan untuk mendorong klien aktif dalam

kegiatan. Hal ini diterapkan pada kegiatan bimbingan non-fisik. Hal ini merupakan stimulus untuk mendinging inisiatif client dalam memberikan respon terhadap sekitarnya.

C. Program Sosial

Salah satu model pemberdayaan dalam program sosial adalah penerapan sistem ketua kelas. Sistem ini diterapkan pada masing-masing kelas, baik putra maupun putri. Klien yang dipilih menjadi ketua kelas adalah mereka yang memiliki kecakapan komunikasi yang baik untuk memudahkan melakukan koordinasi. Ketua kelas bertugas menyampaikan kondisi anggota kelasnya kepada bertugas, terhadap hal-hal yang bersifat positif maupun negatif kepada petugas.

D. Program Pelatihan Keterampilan

Pelatihan keterampilan merupakan model pemberdayaan yang bertujuan untuk memberikan bakal kepada klien yang dapat dikembangkan. Kegiatan keterampilan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sidoarjo adalah pertanian dan hasta karya. Output kegiatan pelatihan keterampilan adalah berupa kemandirian bagi klien. Tujuan dari kegiatan ini bagi keberlanjutan klien adalah untuk mempersiapkan diri klien ketika mereka kembali ke keluarga dan masyarakat. Bahwa dalam mencapai suatu keinginan diperlukan usaha dan proses yang harus dilalui. Sehingga harapannya adalah ketika mereka kembali ke keluarga atau masyarakat dapat berupaya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain.

Analisis Kegiatan Pemberdayaan Menggunakan Teori ACTORS

A. Program Mental Spiritual

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemberdayaan melalui program ini dilakukan dalam 3 kegiatan. Setiap kegiatan memiliki implementasi

teori ACTORS masing-masing, yang dijelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan pada teori ACTORS, kegiatan panggung ekspresi merupakan penerapan dari *confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan). Indikator tersebut merupakan pembentukan kepercayaan diri melalui kemampuan diri sendiri. Implementasi dari indikator tersebut adalah melalui apa yang ditunjukkan saat dirinya berada di panggung ekspresi merupakan salah satu cara untuk membuktikan bahwa klien tersebut memiliki kemampuan dan berani untuk menampilkan dirinya. Hal tersebut sesuai dengan output dalam teori ACTORS yaitu *self confidence* (percaya diri). Selain itu, proses seleksi yang dilakukan dalam memilih klien yang akan menampilkan diri di panggung ekspresi merupakan salah satu bentuk *self respect* (pengakuan diri).

Selanjutnya adalah kegiatan konseling berdasarkan teori ACTORS merupakan salah satu implementasi dari *Support* (dukungan). Tujuan dukungan yang diberikan adalah agar klien dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain memberikan motivasi dan afirmasi positif, salah satu dukungan yang diberikan dalam mendorong perubahan positif adalah dengan memberikan kesadaran bahwa kondisinya saat ini merupakan bagian dari takdir yang harus diterima dan dijalani. Sehingga solusi atas situasi yang terjadi adalah bukan lagi penyebab atas hal yang sudah terjadi melainkan tindakan yang harus dilakukan untuk merubah kondisi tersebut. Tujuan konseling bagi keberlanjutan klien adalah untuk mempersiapkan diri dan sebagai metode *assessment* yang dilakukan untuk mengetahui penanganan lanjutan yang harus diterima klien yang terdapat dua

pilihan, yaitu kembali ke keluarga atau dilakukan rujukan ke UPT lain.

Kegiatan pemberdayaan selanjutnya adalah sistem reward bintang. Pada teori ACTORS, program ini merupakan bentuk implementasi dari output teori ACTORS yaitu *self confidence* (percaya diri) dan *self respect* (pengakuan diri). Percaya diri melalui respon yang diberikan dan pengakuan diri ketika mereka mendapatkan reward atas respon yang diberikan.

B. Program Sosial

Penerapan sistem ketua kelas merupakan implementasi dari indikator *responsibilities* (tanggung jawab). Model pemberdayaan melalui penerapan ketua kelas dilakukan untuk melatih klien dengan memberikan tanggung jawab. melalui tanggung jawab yang diberikan tersebut, maka dapat diketahui apakah seseorang dapat melaksanakan tindakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau tidak. Keberhasilan dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan adalah untuk memberikan kesadaran bahwa tugas yang diberikan harus diselesaikan.

Selain itu, penerapan sistem ketua kelas merupakan implementasi dari indikator *authority* (wewenang) dalam teori ACTORS. Wewenang didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu dan memerintah orang lain untuk mencapai tujuan tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan. Sehingga pemegang kekuasaan memiliki kebebasan dalam memilih, menentukan sikap dan tindakan dalam menyelesaikan tanggung jawab. Pemberian wewenang pada ketua kelas bertujuan untuk mencapai tujuan, yaitu keberhasilan dalam mengkoordinasi anggota kelasnya. Berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh ketua kelas, maka dirinya memiliki kebebasan dalam

menentukan sikap dan tindakan untuk menjalankan kekuasaannya. Implementasi hal tersebut adalah melalui model koordinasi yang dilakukan oleh ketua kelas kepada anggotanya, seperti cara mengingatkan anggota kelas agar mematuhi peraturan dan mengatasi masalah jika tidak tujuan tidak tercapai.

Output model pemberdayaan melalui implementasi indikator *responsibilities* dan *authority* yaitu *self respect* (pengakuan diri) dan *self confidence* (percaya diri). Pertama, pengakuan diri yang terbentuk dari model pemberdayaan penerapan sistem ketua kelas adalah melalui penunjukkan klien yang berhak menjadi ketua kelas. Melalui pemilihan tersebut, klien yang menjadi ketua kelas mendapatkan pengakuan diri dari petugas bahwa dirinya mampu untuk menjadi ketua kelas dan menjalankan tugas yang diberikan. Saat tujuan tercapai dan tugas telah dilaksanakan, maka individu tersebut mampu menjalankan peran. Kedua, implementasi percaya diri melalui penerapan sistem ketua kelas adalah melalui tindakan yang dilakukan klien dalam menjalankan tugasnya.

C. Program Pelatihan Keterampilan

Berdasarkan kegiatan ini, merupakan bentuk implementasi teori ACTORS yaitu *competence* (kemampuan) dan *opportunities* (kesempatan). Bentuk kemampuan yang diberikan adalah melalui pengeahuan terkait pertanian dan hasta karya. Pada kegiatan pelatihan pertanian, klien akan diberikan kemampuan terkait cara menanam, cara merawat tanaman, dan cara melakukan proses panen. Sehingga mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Sedangkan bentuk kesempatan yang diberikan adalah memilih kegiatan

pelatihan keterampilan yang diinginkan. Hal tersebut dibuktikan tidak adanya paksaan yang diberikan kepada klien untuk mengikuti kegiatan keterampilan. Artinya adalah mereka berhak memilih apa yang mereka inginkan.

Analisis Keberfungsian Sosial Pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Psikotik Pasca Mengikuti Pemberdayaan

Untuk mengetahui keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial jenis psikotik, peneliti menganalisis empat informan. Keempat informan tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kembali ke keluarga yang terdiri dari Karim (75 tahun) dan Suprapti (60 tahun). Selain itu informan selanjutnya yang masih berada di balai yaitu Agus Susanto (62 tahun) dan Ernawati (35 tahun). Analisis mengenai keberfungsian sosial menggunakan tiga indikator sebagai berikut :

A. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Dasar

Indikator ini merupakan indikator yang menarik bagi peneliti untuk melihat keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama bagi mereka yang sudah kembali ke keluarga. Hal tersebut disebabkan karena saat mereka di balai segala kebutuhan telah disediakan dan tanggal menikmati sehingga situasi tersebut membuat mereka berada dalam zona nyaman. Sedangkan ketika kembali ke keluarga, semua memerlukan usaha jika ingin terpenuhi. Pada klien yang sudah kembali ke keluarga, keberhasilan dari indikator ini adalah terkait cara yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Terdapat lima jenis dalam kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pertama, kebutuhan fisiologis yang bersifat menjaga kelangsungan

hidup seperti makan, air, dan oksigen. Keberhasilan pembentukan keberfungsian sosial pada klien yang sudah kembali ke keluarga dalam hal ini ditunjukkan dengan kemampuan klien mendapatkan pekerjaan yang memberikan pendapatan bagi mereka untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Pada penelitian ini, informan Karim dan Suprapti berhasil mendapatkan pekerjaan dan upah atas apa yang dikerjakannya. Sedangkan bagi klien yang masih berada di balai, keberhasilan indikator ini adalah melalui keaktifan mengikuti kegiatan yang dilakukan sehingga mampu menghasilkan uang. Pada informan Agus Susanto, uang didapatkan melalui kemampuannya dalam memperbaiki sesuatu yang rusak. Sedangkan pada informan Ernawati melalui keikutsertaan kegiatan keterampilan dan menjadi petugas dapur.

Kedua, kemampuan memenuhi kebutuhan keamanan sebagai bentuk perlindungan dari hal yang membahayakan atau mengancam. Pembentukan keberfungsian sosial dalam hal ini merujuk bagaimana cara individu untuk mengontrol tindakannya untuk menghindari dirinya dari hal yang membahayakan dirinya dalam hidup bermasyarakat, seperti pertengkatan.

Ketiga, kemampuan memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Pada hakikatnya, setiap manusia membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang dari orang yang berada di sekitarnya. Pada pembahasan terkait keberfungsian sosial terkait pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan cinta dan kasih sayang memegang peranan yang sangat penting dan pengaruh yang signifikan. Hal tersebut disebabkan karena melalui terpenuhinya kebutuhan cinta dan kasih sayang sama halnya dengan memberikan dukungan kepada

seseorang. Melalui dukungan tersebut yang akan menjadi motivasi seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Pemenuhan kebutuhan cinta dan kasih sayang pada informan Suprapti didapatkan melalui majikan tempat dia bekerja saat ini. Bentuk cinta dan kasih sayang yang diberikan adalah berupa dukungan agar dirinya fokus bekerja agar penghasilannya bisa dipakai sebagai tabungan di masa tuanya. Sedangkan pada informan Karim, pemenuhan kebutuhan cinta dan kasih sayang pada dirinya berasal dari anak dan menantu yang saat ini tinggal bersamanya. Bentuk cinta dan kasih sayang yang diberikan adalah berupa perhatian seperti memberi makan dan berkomunikasi dengan anaknya yang tinggal berjauhan. Hal tersebut kemudian yang membuatnya nyaman dan merasa aman tinggal bersama menantunya. Selain itu, dirinya juga mengaku bahwasannya menantunya yang baik dan anak-anak yang selalu menanyakan kabarnya membuat dirinya merasa semangat menjalani pekerjaannya saat ini

Keempat, kemampuan memenuhi kebutuhan harga diri. Setiap individu tidak terlepas dari keinginan untuk dihormati dan dihargai keberadaannya oleh orang lain. Harga diri dibentuk oleh tindakan yang dilakukan oleh individu yang dilihat oleh individu lain. Jika tindakan yang dilakukan bersifat positif, maka hal tersebut akan merepresentasikan harga dirinya di mata orang lain. Sehingga seorang individu akan dihormati oleh individu lain berdasarkan tindakan yang dilakukan. Pemenuhan kebutuhan harga diri seiring dengan tingkat kepercayaan diri seseorang. Semakin tinggi harga diri seseorang maka kepercayaan diri juga meningkat.

Tindakan yang dilakukan informan Suprapti dalam memenuhi kebutuhan harga dirinya adalah dilakukan dengan melakukan pekerjaan dengan baik terhadap tugasnya sebagai asisten rumah tangga. Melalui tindakan tersebut majikan merepresentasikan bahwa dirinya dapat diandalkan dan mampu menyelesaikan tanggung jawab.

Sama halnya dengan klien yang masih berada di balai, pemenuhan kebutuhan harga diri dibentuk melalui kemampuan diri dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan di balai.

Kelima, Kemampuan memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merujuk pada kemampuan seseorang dalam melakukan apa yang diinginkan. Hal tersebut biasanya dapat berupa hobi atau kesenangan seseorang. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri pada keberfungsian sosial berfokus terhadap cara yang dilakukan individu dalam memenuhi. Terbentuknya keberfungsian sosial dalam memenuhi kebutuhan aktualisasi diri adalah ketika seseorang tidak bergantung pada orang lain dalam proses pemenuhannya, terutama dalam hal materiil atau uang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pemenuhan kebutuhan ini oleh informan Suprapti adalah melakukan kegiatan yang disukainya di sela kesibukannya bekerja.

Kebutuhan aktualisasi diri pada informan Agus Susanti adalah dengan merokok dan minum kopi. Kebutuhan tersebut dipenuhinya melalui uang yang didapatkan secara mandiri sebagai jasa atas kemampuan yang dimiliki. Sedangkan informan Ernawati memenuhi kebutuhan aktualisasinya dengan bergangung menjadi petugas dapur karena memasak merupakan hal yang disukai.

B. Kemampuan Menjalankan Peran

Keberhasilan pembentukan keberfungsian sosial melalui kemampuan menjalankan peran adalah ketika seorang individu mampu bertindak sesuai dengan status sosialnya di masyarakat. Melalui status sosial tersebut kemudian yang akan memunculkan adanya hak dan kewajiban. Keberadaan status sosial individu adalah memaksa untuk bertindak dan berperilaku sesuai anggapan individu yang di sekitarnya. Jika seorang individu dengan status sosial tidak dapat melaksanakan sesuai hak dan kewajibannya maka akan dianggap menyimpang atau tidak sesuai. Sehingga kemampuan individu dalam menjalankan peran lebih berfokus pada kemampuannya menjalankan tanggung jawab status sosialnya.

Pada penelitian ini, informan klien psikotik mampu menjalankan peran sesuai dengan status dan tugas masing-masing. Pada informan Karim, pekerjaan yang dijalannya saat ini merupakan bagian dari upaya menjalankan peran sebagai kakek dan kepala rumah tangga bagi menantu dan cucunya. Hal ini dilakukan untuk menggantikan tanggung jawab anaknya yang meninggal. Pada informan Suprapti, indikator ini dibuktikan dengan kemampuan yang dilakukan dalam menyelesaikan tugas sebagai asisten rumah tangga. Kemampuan tersebut terbentuk karena adanya pemahaman dan kesadaran terkait apa yang harus dilakukan sebagai asisten rumah tangga.

Sama halnya dengan informan yang masih berada di balai yaitu Agus Susanto dan Ernawati. Pada informan Agus Susanto keberfungsian sosial melalui indikator ini dibuktikan dengan tindakannya dalam melaksanakan tugas sebagai taruna masjid. Sedangkan pada informan Ernawati, kemampuan menjalankan peran ditunjukkan melalui

keberhasilannya dalam menyelesaikan tanggung jawab sebagai ketua kelas 4 putri dan petugas dapur. Keberhasilan pembentukan keberfungsian sosial indikator ini pada informan Ernawati adalah berupa inisiatif melakukan tindakan sesuai dengan tanggung jawab tersebut tanpa diingatkan orang lain.

C. Kemampuan Mengatasi Masalah

Pada proses menjalani kehidupan tidak dapat dilepaskan dari adanya masalah yang berasal dari berbagai sumber. Fokus kemampuan individu dalam menghadapi guncangan dan tekanan pada indikator keberfungsian sosial mengacu pada proses berfikir untuk menemukan penyelesaian masalah. Hal tersebut sangat diperlukan sebelum seseorang dapat menyelesaikan masalah.

Kemampuan berpikir terkait masalah yang dihadapi adalah berupa penyebab dan pencarian solusi melalui orang terdekat. Sehingga pada akhirnya seorang individu memiliki kemandirian dapat menyelesaikan masalahnya sendiri melalui berbagai solusi yang didapatkan sebelumnya. Kemampuan dalam memecahkan masalah bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang penting. Hal tersebut disebabkan karena kondisi mereka saat ini adalah bagian dari ketidakmampuannya dalam menyelesaikan masalah yang mereka miliki, bahkan merupakan bentuk menghindar dari masalah yang ada.

Pada dasarnya, permasalahan yang dialami antar individu tidak sama sehingga cara mengatasinya juga berbeda. Pada informan Karim misalnya dengan permasalahan utama menurutnya adalah perekonomian. Berdasarkan pada pekerjaan dan upah yang didapatkan saat ini, dirinya merasa bahwa belum bisa menghidupi menantu

dan cucunya. Berdasarkan adanya permasalahan tersebut, dirinya tetap bekerja agar tetap mendapatkan upah.

Sedangkan pada informan Suprapti masalah yang dialaminya saat ini adalah kondisi kesehatan dirinya yang terkadang mengganggu aktivitasnya dalam menjalani pekerjaan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah adalah dengan menyampaikan kepada majikannya dan meminta bantuan diantarkan berobat. Keberfungsian sosial melalui tindakan yang dilakukan oleh informan Suprapti adanya munculnya inisiatif untuk bercerita dan menyelesaikan masalah dengan meminta bantuan.

Pada dasarnya kemampuan menghadapi guncangan dan tekanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial berbeda, antara yang sudah kembali ke keluarga dengan yang masih di balai. Bagi klien yang sudah kembali ke keluarga, memiliki potensi yang lebih tinggi akan terjadinya guncangan, tekanan, maupun permasalahan. Hal tersebut disebabkan karena mereka harus beradaptasi dengan masyarakat yang sifatnya heterogen dan memiliki lingkup ruang gerak yang lebih luas. Sedangkan bagi klien yang masih berada dalam balai, memiliki potensi guncangan dan tekanan yang lebih kecil karena ruang lingkup gerak yang terbatas.

Implementasi pada pembentukan keberfungsian sosial melalui indikator ini pada klien psikotik yang masih berada di balai adalah adanya inisiatif untuk sharing masalah yang sedang dihadapi. Hal tersebut dilakukan kepada petugas unit pekerja sosial. Masalah yang dimiliki oleh informan Ernawati sebagai klien di balai adalah kesulitan mengkoordinir teman asrama kelas untuk menjalankan piket sesuai aturan. Padahal pelaksanaan piket bukan hanya tugas petugas piket,

melainkan ketua kelas bertugas untuk mengingatkan dan memastikan agar piket dijalankan sesuai jadwal yang sudah diberikan. Saat ada klien yang tidak menjalankan piket padahal sudah diingatkan, maka itu akan menjadi masalah bagi dirinya sebagai ketua kelas. Upaya informan dalam mengatasi masalah ini adalah dengan mengerjakan tugas temannya yang tidak mau piket dan melaporkan klien yang tidak mengikuti aturan piket ke petugas pekerja sosial. Tindakan melaporkan dipilih karena sudah diingatkan oleh informan sebanyak tiga kali, tetapi tidak mau. Sehingga tujuan dari laporan ke petugas adalah untuk diberikan peringatan agar berkenan melaksanakan tugas piket.

Sedangkan bagi informan Pak Agus Susanto, bentuk upaya menyelesaikan masalah yang dilakukan adalah dengan meminta bantuan kepada petugas. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan dalam kegiatan wawancara, salah satu tugasnya saat ini adalah memperbaiki kerusakan yang ada di masjid, tetapi tidak jarang juga memperbaiki kerusakan yang terjadi di asrama. Masalah yang dimilikinya saat ini adalah kurangnya perabotan dan alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan agar dapat menyelesaikan tugas tersebut adalah dengan meminta bantuan petugas. Hal tersebut dilakukan karena klien tidak diperbolehkan untuk keluar dari lingkungan balai sehingga dirinya tidak dapat membeli sendiri apa yang dibutuhkan.

Kesimpulan

a. Model Pemberdayaan Psikotik

Model pemberdayaan Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sidoarjo dalam membentuk keberfungsian sosial psikotik adalah diterapkan melalui program kegiatan. Fokus pemberdayaan

yang diterapkan adalah pengembangan potensi diri klien psikotik. Implementasi program pengembangan diri ditunjukkan dengan adanya pelatihan keterampilan yang diberikan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan kepada klien untuk dimanfaatkan ketika kembali ke masyarakat nantinya. Implementasi model pemberdayaan dalam membentuk keberfungsian sosial psikotik adalah dengan memberikan pengajaran terkait kehidupan bermasyarakat, yang meliputi nilai dan norma. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri kembali ke keluarga dan masyarakat setelah mendapatkan penanganan. Bentuk kegiatan yang diberikan dalam hal ini adalah melalui bimbingan non-fisik.

b. Keberfungsian Sosial Klien Psikotik Tingkat keberhasilan keberfungsian sosial pada klien psikotik berbeda-beda. Latar belakang perbedaan tersebut adalah faktor lingkungan dan karakter diri klien tersebut. Hal tersebut mayoritas terjadi pada klien yang sudah kembali ke keluarga. Indikator yang digunakan dalam melihat keberfungsian sosial meliputi tiga kemampuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial, dan mengatasi masalah. Keempat informan memiliki implementasi keberfungsian yang berbeda. Pada indikator pertama, keberfungsian sosial yang dari informan 1 dan 2 adalah berupa keberhasilannya mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Sedangkan pada informan 3 dan 4 dibuktikan keterlibatan mereka pada kegiatan keterampilan balai sehingga mendapatkan penghasilan melalui kegiatan tersebut.

Pada indikator kedua, keempat informan dapat menjalankan peran dengan baik sesuai dengan status mereka

saat ini yang dilatarbelakangi oleh kesadaran terhadap apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya pada indikator ketiga dibuktikan dengan adanya inisiatif untuk bercerita terhadap orang terdekat

Implikasi

- a. Pada implementasinya sosialisasi mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial masih minim diselenggarakan. Sehingga dalam hal ini pihak dinas sosial setempat perlu memberikan pengetahuan tersebut kepada masyarakat yang meliputi cara merespon dan penanganan jika terdapat penyandang masalah kesejahteraan sosial di lingkungan sekitar.
- b. Pada proses pengembalian klien, sebaiknya disertai pemberian pemahaman terkait cara membentuk lingkungan sosial yang bagus bagi klien. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan motivasi dan dorongan dalam mendukung perkembangan positifnya. Selain itu terbentuknya lingkungan sosial yang nyaman juga dapat meminimalisir resiko kambuh pada klien.
- c. Peneliti berhadapan pada penelitian selanjutnya dapat mengamati lebih mendalam terkait dampak keberhasilan pembentukan keberfungsian sosial bagi masyarakat sekitar.

Referensi

- Achlis. (2011). *Praktek Pekerjaan Sosial*. Bandung: Kopma STKS.
- Andini, P. (2020). *Analisis Deskriptif Keberfungsian Sosial Eks Orang Dengan Gangguan Pengguna Zat (ODGPZ) di Desa Dalam Kecamatan Karang Baru*

- Kabupaten Aceh Tamiang. Skripsi: Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Arikunto, S. (2007). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asror, D. (2021, Februari 05). *Keberfungsian Sosial Era Digital*. Retrieved from [ketik.unpad.ac.id: https://ketik.unpad.ac.id/posts/2076/keberfungsian-sosial-era-digital-1](https://ketik.unpad.ac.id/posts/2076/keberfungsian-sosial-era-digital-1)
- Dwijowojoto, R. W., & Nugroho, R. (2007). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT. Elex Media Kopentindo.
- Ekasari, Y., & Efendi, A. (2020). Peranan Rumah Sakit Jiwa Mahoni Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Eks Orang Dengan Gangguan Jiwa. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 1 44-57.
- Farhati, A. R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan NonFormal Pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Pada PMKS di Rumah Pintar Al-Ikhlas Yatim dan Dhuafa Cabang Serang Banten). *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 6 No. 2 (209-226).
- Febryan, F. A. (2016). *Implementasi Kebijakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)*. Skripsi: Malang: Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
- Gischa, S. (2020, 01 24). *Pemberdayaan Komunitas: Pengertian, Proses, Prinsip, dan Contohnya*. Retrieved from [Kompas.com: https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/24/100000469/pemberdayaan-komunitas-pengertian-proses-prinsip-dan-contohnya?page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/24/100000469/pemberdayaan-komunitas-pengertian-proses-prinsip-dan-contohnya?page=all)
- Handayani, d. (2019). Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat*, 1-11.
- Homizeh. (2018). *Pemberdayaan Perempuan Melalui Organisasi Bank Sampah Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga*. Skripsi: Madura: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Universitas Trunojoyo Madura.
- Ife, J. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasasmitha, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pusaka Cisendo.
- Maani, K. (2011). Teori ACTORS Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Demokrasi*, Vol 10, No.1 1-14.
- Macaulay, S., & Cook, S. (1997). *Perfect Empowerment*. Jakarta: PT, Elex Media Komputindo.
- Mahmud, A. (2008). *Teknik Simulasi dan Permodelan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Mardikarto, T., & Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2011). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Nadi Persada.

- Mulyana, D. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murni, R. (2019). Keberfungsian Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Pasca Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Galih Pakuan di Bogor. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 9 No. 1 17-35.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Nuriana, R. (2017). *Pemberdayaan "PMKS" (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Lansia Terlantar di UPTD Griya Werdha Kota Surabaya*. Skripsi: Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Airlangga.
- Pertiwi, A. P. (2019). *Keberfungsian Sosial Eks Psikotik Pasca Rehabilitasi Dari Rumah Singgah Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta (BRSBKL)*. Skripsi: Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Soekanto, S. (1987). *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suharto. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulistiyani, A. T. (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumodiningrat, G. (1996). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Syamsi, I., & Haryanto. (2018). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: UNY Press.
- Taftazani, B. M. (2017). Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Psikotik. *Jurnal Prosiding KS*, 129.
- Taftazani, B. M. (2017). Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Psikotik. *Jurnal (Prosiding Kesejahteraan Sosial)*, 129.
- Usman, S. (2003). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Yosep, I. (2010). *Keperawatan Jiwa*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media.